

**ANALISIS PROPORSI BELANJA APARATUR DAN BELANJA PELAYANAN
PUBLIK TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROPINSI NTT**

Fransiscus Nicodemus Naiola

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Nicophrance@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah a) untuk mengetahui proporsi belanja aparatur dan Belanja Publik terhadap belanja daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi sebesar 94,23% artinya dana yang belum dibelanjakan untuk belanja operasi sebesar 5,77%, realisasi belanja modal sebesar 87,74% artinya dana yang belum digunakan untuk belanja modal dalam tahun 2018 sebesar 12,26%. Dengan demikian jumlah belanja untuk tahun 2018 sebesar 93,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari jumlah dana belanja yang ditargetkan dalam tahun 2018. Proporsi belanja public pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 menunjukkan nilai sebesar 17,09%, proporsi belanja pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 12,07%, proporsi belanja pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 10,10 %. Kesimpulan penelitian adalah Belanja aparatur tahun 2016 sebesar Rp. 947,657,462,249 atau 82,91%, Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 1,142,993,114,573 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 82,91%, belanja aparatur tahun 2017 sebesar Rp. 1,782,672,303,623 atau 88%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,027,422,950,403 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 87,93% dan belanja aparatur tahun 2018 sebesar Rp. 2,004,452,660,342 atau 90%, Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,229,633,036,614 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 89,90%. Disarankan agar pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengurangi alokasi belanja operasional atau alokasi belanja aparatur dan meningkatkan alokasi belanja public atau alokasi belanja modal sehingga hasil pembangunan dapat juga dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, paling tidak besaran alokasi antara proporsi belanja aparatur dengan belanja modal perbandingannya 50%

Kata Kunci : Belanja Aparatur dan Belanja Publik

A. PENDAHULUAN

Pandangan yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini yakni diduga terdapat Kecenderungan pada perencanaan anggaran di Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan partisipasi masyarakat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan social masyarakat. Kecendrungan ini akan dilihat dari keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan jumlah dana yang menyangkut kepentingan masyarakat pada APBD sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan maupun alokasi anggaran ditengarai belum dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan proporsi bagi pengeluaran aparatur yang melebihi pengeluaran publik dengan presentase yang tidak seimbang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui alokasi proporsi belanja dan mengkajinya secara mendalam agar pelaksanaan

pembangunan dengan menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat dapat di pertunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan judul penelitian **Analisis Proporsi Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Bagaimana Proporsi Belanja Publik Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Untuk Mengetahui Proporsi Belanja Publik Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur

B. TINJAUAN TEORI

Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (2001: 63), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan.

Halim (2004: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 2005: 16).

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu : pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Syamsi (2006: 199) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Halim (2004 : 231) Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Hariadi (2010 : 25) menyebutkan bahwa Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

Tanjung (2002 : 90) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara, Halim (2004 : 329) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana pengeluaran tahunan daerah yang menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber – sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran – pengeluaran yang telah dianggarkan

Mulyana (2010 : 32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara

Dari definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang akan digunakan untuk belanja rutin dan belanja modal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pementukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan/tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersembahkan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum baik dalam bentuk uang maupun barang

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan pasal 53, Permendagri 59/2007 dinyatakan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan

Analisis kinerja keuangan pada APBD

Pengertian analisis keuangan menurut Halim (2007 : 231) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah: a) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat), b) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya, c) Pemerintah pusat/propinsi sebagai saran masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, d) Masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman atau pun membeli obligasi.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 231).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169).

Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula Rasio Belanja Aparatur terhadap total Belanja menurut Mahsun (2012 : 154) dapat ditunjukkan berikut ini

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap Total Belanja

Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula Rasio Belanja Publik terhadap total Belanja menurut Mahsun (2012 : 154) dapat ditunjukkan berikut ini

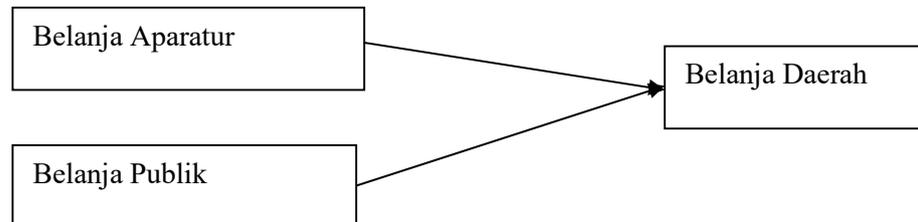
$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2004:235). Karena pemerintah harus membelanjakan kegiatannya untuk pelayanan dan gaji pegawai, maka alokasi belanja pembangunan dan belanja rutin harus disesuaikan dengan total pendapatannya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Kerangka Berpikir

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Analisa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya berguna sebagai evaluasi saja, tetapi karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka analisa laporan keuangan juga digunakan untuk membantu memahami serta menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio Proporsi Belanja Rutin dan Belanja Publik atau Melanja Modal. Belanja rutin pemerintah meliputi belanja pegawai/personal, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan

belanja pemeliharaan, sedangkan belanja modal meliputi belanja jalan dan jembatan, belanja irigasi, belanja listrik dan jaringan dan belanja public lainnya. Yang diharapkan dalam proporsi belanja adalah belanja public atau belanja modal harus lebih tinggi dari pada belanja aparatur sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka berpikir berikut ini :



Gambar 1: Kerangka Berpikir (Hasil olahan penulis Tahun 2019)

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur 2016-2018.

Data primer

Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang belanja aparatur dan belanja Publik.

Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2018.

Teknik Pengambilan data

- Dokumentasi yakni penulis melakukan analisis dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2016-2018 dan selanjutnya diambil sesuai kebutuhan analisis
- Wawancara; penulis menggali informasi tambahan dari informen berkaitan dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2018

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif , yaitu suatu metode analisis yang ditujukan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan/menghimpun data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil perhitungan proporsi belanja aparatur dan belanja publik. Alat – Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Keserasian yang terdiri dari

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio di atas akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan kaidah analisis selanjutnya ditarik kesimpulan

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Biro Keuangan Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan anggaran dan realisasi belanja sebagai media control terhadap penggunaan keuangan daerah untuk membelanjakan semua komponen belanja yang telah ditentukan baik itu belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja modal dan belanja tak terduga. Untuk mengetahui anggaran dan realisasi belanja tahun 2016, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Anggaran Belanja dan Realisasi pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT Tahun 2016 (Data olahan)

No	URAIAN	2011		
		Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	491,826,977,462	474,826,977,462	96.54
	Belanja Barang	402,879,057,587	392,209,057,587	97.35
	Belanja Hibah	7,847,249,500	6,747,249,500	85.98
	Belanja Bantuan Soaial	68,081,291,700	65,081,291,700	95.59
	Belanja Bantuan Keuangan	9,792,886,000	8,792,886,000	89.79
	Jumlah Belanja Operasi	980,427,462,249	947,657,462,249	96.66
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah	12,000,000	10,000,000	83.33
	Belanja Peralatan dan Mesin	33,293,760,082	32,293,760,082	97.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	17,412,602,665	16,412,602,665	94.26
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146,478,361,552	145,478,361,552	99.32
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,240,928,025	1,140,928,025	91.94
	Jumlah Belanja Modal	198,437,652,324	195,335,652,324	98.44
	JUMLAH BELANJA	1,179,794,766,173	1,142,993,114,573	96.88

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi sebesar 96.66%, realisasi belanja modal sebesar 98.44%, . Dengan demikian jumlah belanja untuk tahun 2016 sebesar 96.88%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari jumlah dana belanja yang ditargetkan dalam tahun 2016

2) Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Biro Keuangan Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Untuk mengetahui Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Biro Keuangan Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2: Anggaran Belanja dan Realisasi pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT Tahun 2017 (Data olahan)

No	URAIAN	2012		
		Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	568,566,407,606	568,870,522,453	100.05
	Belanja Barang	423,936,782,856	390,158,928,125	92.03
	Belanja Hibah	835,601,467,850	712,564,253,045	85.28
	Belanja Bantuan Sosial	73,393,470,000	64,725,830,000	88.19
	Belanja Bantuan Keuangan	16,152,250,000	12,888,770,000	79.80
	Jumlah Belanja Operasi	1,917,650,378,312	1,782,672,303,623	91.22
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah	95,000,000	25,000,000	26.32
	Belanja Peralatan dan Mesin	49,622,846,335	47,311,340,425	95.34
	Belanja Gedung dan Bangunan	54,320,404,144	47,106,234,134	86.72
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163,579,391,100	149,280,693,421	91.26
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,151,886,000	1,027,196,800	89.18
	Jumlah Belanja Modal	268,769,527,579	244,750,464,780	91.06
	JUMLAH BELANJA	2,212,398,302,292	2,027,422,768,403	91.64

Data dalam tabel 2 di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi sebesar 91.22% artinya dana yang belum belanjakan sebesar 8,78%, realisasi belanja modal sebesar 91.06% artinya dana yang belum digunakan untuk belanja modal sebesar 8,36%. Dengan demikian jumlah realisasi belanja untuk tahun 2017 secara keseluruhan sebesar 91.64% artinya jumlah dana belanja yang belum digunakan untuk belanja dalam tahun 2012 sebesar 8.36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari jumlah dana belanja yang ditargetkan dalam tahun 2017.

c) Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Biro Keuangan Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

Untuk mengetahui Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Biro Keuangan Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka dapat dilihat dalam tabel 3. berikut ini :

Tabel 3: Anggaran Belanja dan Realisasi pada
 Biro Keuangan Setda Provinsi NTT Tahun 2018 (Data Sekunder)

No	URAIAN	2013		
		Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	638,366,408,606	638,566,408,606	100.00
	Belanja Barang	527,936,782,856	517,936,782,856	98.11
	Belanja Hibah	863,601,169,850	707,231,169,850	81.89
	Belanja Bantuan Sosial	64,892,179,000	91,892,179,000	141.61
	Belanja Bantuan Keuangan	23,152,250,000	22,152,250,000	95.68
	Jumlah Belanja Operasi	2,125,703,511,550	2,004,452,660,342	94,23
2	BELANJA MODAL			

	Belanja Tanah	98,500,000	98,500,000	100.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	48,622,846,835	48,622,846,835	100.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	46,320,417,149	48,320,417,149	104.32
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	158,579,391,100	144,479,391,100	91.11
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,751,886,000	1,851,886,000	105.71
	Jumlah Belanja Modal	256,637,894,900	225,180,376,272	87.74
	JUMLAH BELANJA	2,382,341,406,450	2,229,633,036,614	93.59

Data dalam tabel 3 di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi sebesar 94,23% artinya dana yang belum dibelanjakan untuk belanja operasi sebesar 5,77%, realisasi belanja modal sebesar 87,74% artinya dana yang belum digunakan untuk belanja modal dalam tahun 2018 sebesar 12,26%. Dengan demikian jumlah belanja untuk tahun 2018 sebesar 93.59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari jumlah dana belanja yang ditargetkan dalam tahun 2018.

b. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Belanja Aparatur terhadap belanja Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mengetahui proporsi belanja aparatur atau Belanja Operasional Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

a. Analisis Proporsi Belanja Aparatur Tahun 2016

Proporsi Belanja Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2016 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

2016	Belanja Aparatur	$\frac{947,657,462,249}{1,142,993,114,573}$	X 100	= 82.91%
------	------------------	---	-------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan tentang proporsi belanja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 menunjukkan nilai sebesar 82,91%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 1,142,993,114,573 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 82,91% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 947,657,462,249.

b. Analisis Proporsi Belanja Aparatur Tahun 2017

Proporsi Belanja Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2017 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

2017	Belanja Aparatur	$\frac{1,782,672,303,623}{2,027,422,950,403}$	X 100	= 87.93%
------	------------------	---	-------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan tentang proporsi belanja pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 87,93%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,027,422,950,403

dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 87,93% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 1,782,672,303,623

c. Analisis Proporsi Belanja Aparatur Tahun 2018

Proporsi Belanja Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2018 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

2018	Belanja Aparatur	$\frac{2,004,452,660,342}{2,229,633,036,614}$	X 100	= 89,90%
------	------------------	---	----------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan tentang proporsi belanja pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 89,90 %. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,229,633,036,614 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 89,90% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 2,004,452,660,342

Tabel 4: Perubahan Belanja Aparatur Tahun 2016 - 2018
(Data Sekunder olahan penulis tahun 2019)

Keterangan	Tahun			Trend	
	2016	2017	2018	2017	2018
Belanja Aparatur	82,91%	87,93%	89,90%	5,02%	1,97%

Berdasarkan data sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa belanja aparatur pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,02% atau meningkat dari 82,91% di tahun 2016 menjadi 87,93% di tahun 2017 dan selanjutnya dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,97% atau meningkat dari 87,93% di tahun 2017 menjadi 89,90% di tahun 2018

2. Analisis Belanja Modal atau belanja Publik terhadap belanja Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur

a. Analisis Proporsi Belanja Modal atau belanja publik Tahun 2016

Proporsi Belanja Publik Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2016 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

2016	Belanja Modal	$\frac{195,335,652,324}{1,142,993,114,573}$	X 100	= 17,09%
------	---------------	---	-------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan tentang proporsi belanja public Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 menunjukkan nilai sebesar 17,09%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp.1,142,993,114,573 dialokasikan untuk belanja publik atau belanja modal sebesar 17,09% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 195,335,652,324.

b. Analisis Proporsi Belanja Modal atau belanja publik Tahun 2017

Proporsi Belanja Publik Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2017 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

2017	Belanja Modal	$\frac{244,750,646,780}{2,027,422,950,403}$	X 100	= 12.07%
------	---------------	---	----------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan tentang proporsi belanja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 12,07%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,027,422,950,403 dialokasikan untuk belanja modal atau belanja publik sebesar 12,07% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 244,750,646,780.

c. Analisis Proporsi Belanja Modal atau belanja publik Tahun 2018

Proporsi Belanja Publik Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2018 dapat dilihat dalam perhitungan berikut ini :

2018	Belanja Modal	$\frac{225,180,376,272}{2,229,633,036,614}$	X 100	= 10.10%
------	---------------	---	-------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan tentang proporsi belanja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 10,10 %. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,229,633,036,614 dialokasikan untuk belanja public atau belanja modal sebesar 10,10% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 225,180,376,272

Tabel 5: Perubahan Belanja Modal Tahun 2016-2018
(Data Sekunder olahan penulis tahun 2019)

Keterangan	Tahun			Trend	
	2016	2017	2018	2017	2018
Belanja Modal	17.09	12.07	10.10	-5.02	-1.97

Berdasarkan data sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa belanja Modal / belanja publik pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,02% atau menurun dari 17,09% di tahun 2016 menjadi 12,07% ditahun 2017 dan selanjutnya dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 1,97% atau menurun dari 10,07% di tahun 2012 menjadi 10,10% di tahun 2018. Penurunan belanja modal dari tahun ketahun ini membuktikan bahwa pemerintah Propinsi belum memfokuskan pembangunan pada kesejahteraan public akan tetapi masih pada kepentingan pemenuhan kebutuhan aparatur atau pada kebutuhan operasional birokrasi

Selanjutnya hasil analisis belanja aparatur dan belanja modal sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6: Perubahan Belanja Aparatur Tahun 2016 - 2018
 (Data Sekunder diolah Penulis tahun 2019)

No	Keterangan	Tahun					
		2016	%	2017	%	2018	%
1	Belanja Aparatur	947,657,462,249	82.91	1,782,672,303,623	88	2,004,452,660,342	90
2	Belanja Modal	195,335,652,324	17.09	244,750,646,780	12	225,180,376,272	10
JUMLAH		1,142,993,114,573	100	2,027,422,950,403	100	2,229,633,036,614	100

Hasil perhitungan proporsi belanja aparatur dan belanja modal sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa belanja aparatur tahun 2016 sebesar Rp. 947,657,462,249 atau 82,91%, belanja aparatur tahun 2017 sebesar Rp. 1,782,672,303,623 atau 88% dan belanja aparatur tahun 2018 sebesar Rp. 2,004,452,660,342 atau 90%, sedangkan belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 195,335,652,324 atau 19,09%, belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 244,750,646,780 atau 12% dan belanja modal untuk tahun 2018 sebesar Rp. 225,180,376,272 atau 10%

KESIMPULAN

- Belanja aparatur tahun 2016 sebesar Rp. 947,657,462,249 atau 82,91%, Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 1,142,993,114,573 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 82,91%, belanja aparatur tahun 2017 sebesar Rp. 1,782,672,303,623 atau 88%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,027,422,950,403 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 87,93% dan belanja aparatur tahun 2018 sebesar Rp. 2,004,452,660,342 atau 90%, Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,229,633,036,614 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 89,90%.
- Belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 195,335,652,324 atau 17,09%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 1,142,993,114,573 dialokasikan untuk belanja public atau belanja modal sebesar 17,09% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 195,335,652,324; belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 244,750,646,780 atau 12%. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,027,422,950,403 dialokasikan untuk belanja modal atau belanja publik sebesar 12,07% dengan nilai absolutnya sebesar Rp. 244,750,646,780.. Capaian angka prosentase ini menunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 2,229,633,036,614 dialokasikan untuk belanja public atau belanja modal sebesar 10,10% dan belanja modal untuk tahun 2018 sebesar Rp. 225,180,376,272 atau 10%

Saran

Disarankan agar pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengurangi alokasi belanja operasional atau alokasi belanja aparatur dan meningkatkan alokasi belanja public atau alokasi belanja modal sehingga hasil pembangunan dapat juga dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, paling tidak besaran alokasi antara proporsi belanja aparatur dengan belanja modal perbandingannya 50%.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Harsono 2016; *Analisis Proporsi Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sika*
- Halim Abdul, 2014. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hariadi Pramono; 2014; *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Kunarjo 2016; *Analisis Kinerja Keuangan Pemda dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan pada APBD di Kota Malang*. Jurnal Penelitian Uneversitas Negri Malang. Tahun 20 Nomor 2.
- Mahmudi, 2017, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mahsun Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Marthen Nomleni 2016; *Analisis Belanja Aparatur dan Belanja Publik Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Alor*
- Mulyana Budi 2014, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta
- Syamsi 2016; *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Tanjung 2012; *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.